

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), h. 85.
- Abdul Rahman Ghazali, 2008, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, cet. Ke-3, hlm.7, h. 68
- Ali Afandi. 1986. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Bina Aksara.
- Anwar Borahima. *Kedudukan Yayasan di Indonesia: Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan*. Kencana: Jakarta.2010. h. 51
- Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, & pengendalian penduduk dan keluarga berencana. (2017). *Profil Anak Kota Tangerang*
- Endang Sumiarni dan Chandera Halim. 2000. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya. h. 49
- Gatot Supramono. *Hukum Yayasan Di Indonesia*. Rineka Cipta: Jakarta.2008. h. 56
- Gatot Supramono. *Hukum Yayasan Di Indonesia*. Rineka Cipta: Jakarta.2008. h. 50
- Jhonny Ibrahim. 2005. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Pertama. Malang: Bayu Media. hal. 248
- Krisnawati Emeliana. 2005. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung. H. 65
- Mohammad Teja, “Perlindungan terhdap anak terlantar di panti asuhan”, *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, VOL.6, NO.5, 2014, h. 32
- Nana Sudjana dan Ibrahim. 2009. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.h. 64
- R. Ali Rido. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Alumni: Bandung.2004. h. 82
- R.Subekti. *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata* . (Jakarta: Intermedia. 1977) hlm.44
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek hukum perorangan dan kekeluargaan di Indoenesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 90
- Rakhmawati, I. (2015). *Peran keluarga dalam pengasuhan anak*. Bimbingan Konseling Islam, 6, h. 1- 18
- Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016, hlm. 253
- Satria Efendi M, Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta:Kencana, 2004) h.137
- Scholten. *Vertegenw, en Rechtspersoon*, sebagaimana dikutip oleh R. Ali Rido. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Alumni. Bandung.2004. h. 91
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 13
- Subekti. 1990. *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, PT. Intermedia, Jakarta. h. 34
- Sulistiani Siska. 2015. *Kedudukan Hukum Anak*, Refika Aditama, Bandung. h. 41
- Zulhair. 2003. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri. h. 120

JURNAL

- Antika Farah, “Peratura dan Pelaksanaan Perwalian Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Berdasarkan Hukum Perdata Indoensia (studi kasus di panti social asuhan anak Aisyiyah Semarang)”, *Dipenegoro Law Journal*, VOL.5 NO.3, 2016, h.65
- Atika Farah, “Pengaturan dan pelaksanaan perwalian oleh Lembaga kesejahteraan social anak bedasar Hukum Perdata Indoneisa (studi kasus di panti social asuhan anak aisyiyah semarang)”, *Dipenegoro Law Journal*, VOL.5, No.3, 2016. h. 42
- Della G. Palar, “*Kedudukan Hukum Yayasan Sebagai Wali Atas Anak-Anak Panti Asuhan*”, *Lex Privatum* Vol. VI/No. 10/Des/2018
- Frisca Putri Prihandini, “*Pelaksanaan perwalian anak Oleh panti asuhan widya kasih boyolali Berdasarkan hukum yang berlaku di indonesia*”, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, (SKRIPSI), 2008. h. 94
- Hariadi, “mengkaji mengenai tinjauan yuridis terhdap pencabutan kekuasaan orang tua dan perwlian terhadap anak menurut hukum positif Indonesia.”, *Jurnal Private Law*, Volume 1, Issue 2, Juni 2021, E-ISSN 2775-955, h. 78
- Hasnah Aziz, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Panti Asuhan Di Kota Tangerang Dalam Memperoleh Akta Kelahiran”, *Lex Jurnalica* Volume 17 Nomor 3, Desember 2020. h. 92
- Indartono Dharma, “*mungkinkan suatu yayasan panti asuhan berkedudukan sebagai waris menurut Burgerlijk Wetboek (BW)*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1982, Suarabaya. h. 60
- Mahmudin Kobandaha, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”, Vol. 23, No. 8, Januari/2017 *Jurnal Hukum Unsrat*. H. 86
- Malisa, “Problematika Hukum Atas Pernyataan Putus Hubungan Antara Orangtua Angkat Dan Anak Angkat”,
<https://media.neliti.com/media/publications/14086-ID-problematika-hukum-atas-pernyataan-putus-hubungan-antara-orangtua-angkat-dan-ana.pdf>
- Mansari, “Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris di Mahkamah Syar“iyah Banda Aceh”, *Jurnal Petita*, Volume 1 Nomor 1, April 2016. h. 85
- Mocahmmad Charistal Chubba, “kesesuain pasal 108 KHI tentang wasiat perwalian anak kepada badan hukum dengan hukum islam”, *Junal Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, VOL.08, NO.02, 2018 Desember, ISSN:2089- 7480, h. 84
- Nathalia Jesica Djumati, “Penentuan perwalian anak akibat perceraian menrut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”, *Jurnal Lex Privatum*, VOL.6, NO. 4, 2018 Januari, h. 23
- Nathalia Jesica Djumati, “Penentuan perwalian anak akibat perceraian menrut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”, *Jurnal Lex Privatum*, VOL.6, NO. 4, 2018 Januari
- P.M. Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 67; J. Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm.272; dan L.J. Moleong, *Metodologi Penelitian*

- Kualitatif*, PT. Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm.189.
- Said, M. F, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” *Jurnal Cendekia Hukum*, 2018, 4(1), h. 141-152.
- Tomy Michael, “Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Mimbar Keadilan*, 2017, 229, <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195>.
- Umul Khair, “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume 5 Nomor 2, Maret 2020, e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657, Open Access: <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam Pasal 33 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil,
 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak
 Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 Pasal 1 angka 5 Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 Pasal 33 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil.

WEB LAINNYA

<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>
 (diakses pada tanggal 21 Oktober 2020 Pukul 20.00)